

Renstra 2016-2021
DKP Kab. Bengkalis

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS**

Alamat : Jalan Pertanian No. 04Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis, Riau
Telpon (0766) 22510, Fax (0766) 22510

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Review Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA SOPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Riview RENSTRA SOPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Riview RENSTRA SOPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sesuai yang diharapkan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritikan bagi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Terima kasih, semoga Dokumen Review Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – SOPD) Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bagi Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bengkalis selama lima tahun kedepan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS,



Ir. HERLIAWAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650721 199203 1 008

DAFTAR ISI

| Isi | Halaman |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SOPD..... | 8 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 8 |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan | 13 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan | 15 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... | 20 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS..... | 24 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD..... | 24 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan WKD Terpilih..... | 25 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... | 29 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 32 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... | 32 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... | 36 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan..... | 36 |
| BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 41 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 45 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 52 |
| BAB VIII. PENUTUP | 54 |

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai Instansi Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab kepada bupati selaku kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis bertugas mengemban peningkatan pembangunan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah diatur kembali dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 55 tahun 2016.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SOPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) daerah dan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD).

Sebagaimana amanat tersebut, seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) wajib menyusun Rencana strategis (RENSTRA) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SOPD disusun mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercermin pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021.

Untuk merespon berbagai tuntutan perubahan ke arah kinerja pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan strategis, antara lain dengan diimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tatanan lokal, implementasi kedua substansi perundang-undangan tersebut telah membawa perubahan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditandai dengan bergesernya pengelolaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sentralistis ke arah desentralistis, demokratis dan otonom. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten berkewajiban mengembangkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, meningkatkan intensitas pembangunan yang berkelanjutan dan mendorong bangkitnya pembangunan daerah dimasa depan.

Terkait dengan mekanisme perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Menurut Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, bahwa perencanaan pembangunan yang diharapkan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025 yang telah dijabarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 guna menggambarkan tentang indikasi perencanaan pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan khususnya pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan, juga dengan memperhatikan kesinambungan dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2015, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA SOPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

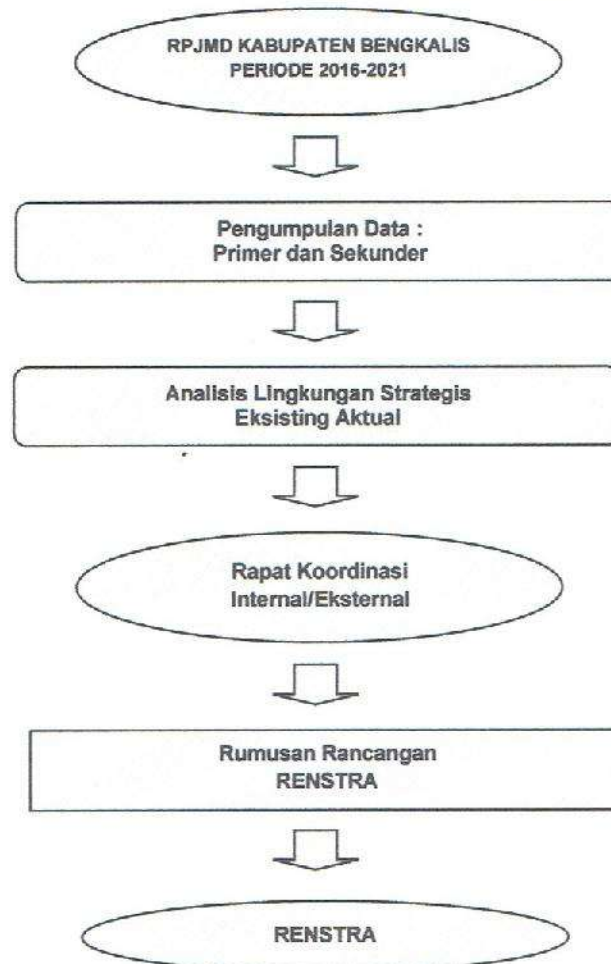
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai institusi pelayanan secara teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga

tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Untuk itu RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode.

Dokumen RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan pada fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah pelayanan publik dibidang kelautan dan perikanan. Penyusunan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui berbagai tahapan , mulai pengumpulan data primer/skunder (eksternal/internal), analisis kondisi aktual/eksisting, berbagai rapat dan pertemuan koordinasi, perumusan rancangan RENSTRA dan penetapannya. Adapun proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut ;

Gambar 1.1

**Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021**



Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi teknis untuk membangun pemerintahan dan masyarakat kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis serta sebagai acuan dan pedoman untuk mencapai Visi dan Misi Kepala daerah yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kelautan dan perikanan periode tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan atau sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

1. Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SOPD.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD
- 2.2. Sumber Daya SOPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan SOPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V . STRATEGI DAN ARAH

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN SOPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor: 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu, dan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. T u g a s

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

b. F u n g s i

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang

pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan tugas dan fungsi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dibantu unsur pimpinan yaitu unsur sekretariat dan unsur pelaksana tiga kepala bidang.

2.1.1. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Pemberdayaan Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan
4. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Perizinan
 2. Seksi Pencatatan Usaha Perikanan
 3. Seksi Produksi Perikanan Tangkap
5. Bidang Budidaya Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 3. Seksi Perbenihan dan Produksi Budidaya.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) :

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50,51,52,53,54 dan 55 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

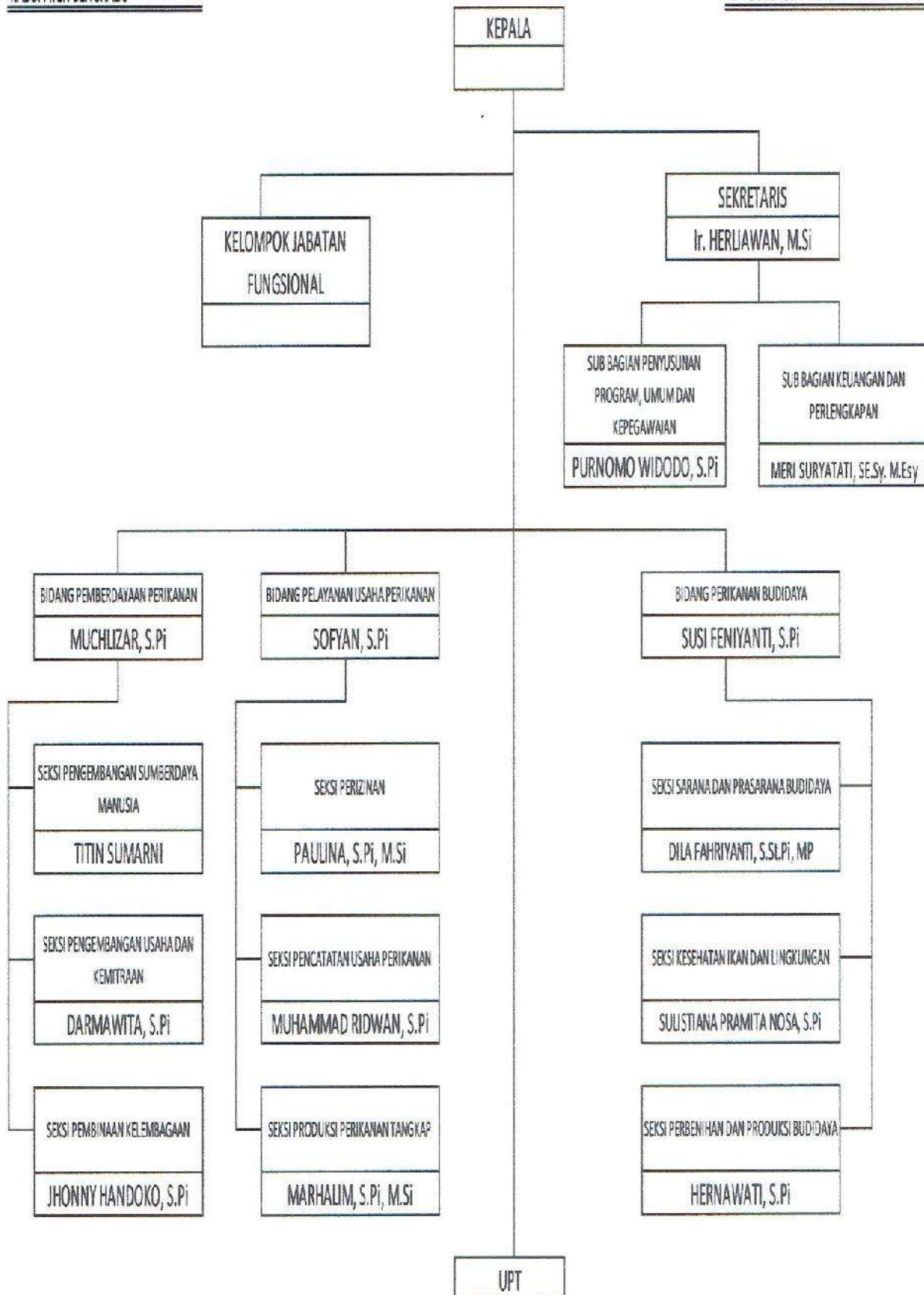
Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (Tabel 1).

7. Kelompok Jabatan Fungsional :

Tabel II. 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan Dan Perikanan

| NO | UPT | KEDUDUKAN | WILAYAH KERJA |
|----|---|--|--|
| 1. | Unit Produksi Perikanan | Desa Penebal Kecamatan Bengkalis | Kec. Bengkalis dan Kec. Bantan |
| 2. | Balai Benih Ikan Pantai | Desa Papal Kecamatan Bantan | Kec. Bantan dan Kec. Bengkalis |
| 3. | Balai Benih Ikan Air Tawar | Desa Bali Raja Kecamatan Pinggir | Kec. Pinggir, Kec. Mandau, Kec. Bathin Solapan dan Kec. Talang Muandau |
| 4. | Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Rupal | Tanjung Medang Kec. Rupal Utara | Kec. Rupal dan Kec. Rupal Utara |
| 5. | Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar | Kecamatan Mandau | Kec. Pinggir, Kec. Mandau, Kec. Bathin Solapan dan Kec. Talang Muandau |
| 6. | Pengelolaan Perairan Umum Daratan | Sungai Pakning Kec. Bukit Batu | Kec. Bukit Batu, Kec. Siak Kecil dan Kec. Bandar Laksamana |

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 55 Tahun 2016 sebagaimana gambar dibawah ini ;



2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

A. Uraian Tugas Bagian Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan.

B. Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan Perikanan

Bidang Pemberdayaan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan perikanan;

C. Uraian Tugas Bidang Pelayanan Usaha Perikanan

Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan usaha perikanan ;

D. Uraian Tugas Bidang Budidaya Perikanan

Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dibidang budidaya perikanan yang meliputi sarana prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembenihan dan produksi budidaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

2.2.1 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan

Jumlah seluruh pegawai yang bertugas pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017 sebanyak 74 orang yang terdiri dari 58 orang Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer sebanyak 16 orang.

Pegawai dan tenaga honorer berdasarkan tingkat pendidikan dan petugas teknis maupun non teknis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2 dan tabel 3 dibawah ini ;

Tabel II. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | TEKNIS | NON TEKNIS |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1. | S2 | 7 | - |
| 2. | S1 | 27 | - |
| 3. | D3 | - | 1 |
| 4. | SLTA | 2 | 20 |
| 5. | SLTP | - | 1 |
| 6. | SD | - | - |
| J U M L A H | | 36 | 22 |

Tabel II. 3. Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan keahliannya Tahun 2017

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | TEKNIS | NON TEKNIS |
|--------------------|--------------------|----------|------------|
| 1. | S1 | 2 | - |
| 2. | D3 | 1 | - |
| 3. | D2 | - | - |
| 4. | D1 | - | - |
| 5. | SLTA | 1 | 8 |
| 6. | SLTP | - | 2 |
| 7. | SD | - | 2 |
| J U M L A H | | 4 | 12 |

2.2.2. Golongan Ruang

Golongan Ruang Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel II.4. Bizetting Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Tabel II. 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017

| NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------------------|--------------|-----------|------------|
| 1. | Golongan I | 1 | - |
| 2. | Golongan II | 18 | - |
| 3. | Golongan III | 33 | - |
| 4. | Golongan IV | 6 | - |
| J U M L A H | | 58 | - |

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang upaya pencapaian sasaran. Data sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel II.5.

Tabel II. 5. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.

| NO | KODE | NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG) | JUMLAH | HARGA |
|-----|------|---|--------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 12 | Pemerintah kabupaten/kota | | |
| 1 | 01 | Tanah | 4 | 459.697.200,00 |
| 2 | 02 | Alat-alat besar | 13 | 58.772.200,00 |
| 3 | 03 | Alat-alat angkutan | 77 | 3.568.851.286,99 |
| 4 | 04 | Alat bengkel dan alat ukur | 41 | 209.065.883,68 |
| 5 | 05 | Alat pertanian | 50 | 686.587.363,80 |
| 6 | 06 | Alat kantor dan rumah tangga | 914 | 4.373.991.006,96 |
| 7 | 07 | Alat studio dan alat komunikasi | 59 | 325.385.166,09 |
| 8 | 09 | Alat laboratorium | 72 | 730.254.824,92 |
| 9 | 10 | Alat-alat persenjataan/keamanan | 4 | 35.458.000,00 |
| 10 | 11 | Bangunan gedung | 44 | 18.777.966.966,84 |
| 11 | 12 | Monumen | 6 | 153.804.000,00 |
| 12 | 13 | Jalan dan Jembatan | 6 | 1.377.774.800,00 |
| 13 | 14 | Bangunan Air/Irigasi | 66 | 8.543.394.725,05 |
| 14 | 15 | Instalasi | 11 | 471.292.088,89 |
| 15 | 16 | Jaringan | 2 | 75.337.000,00 |
| 16 | 17 | Buku dan Perpustakaan | 6 | 70.576.000,00 |
| 17 | 20 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 2 | 52.400.000,00 |
| | | Jumlah | | 39.970.608.513,22 |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk melihat tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja selama tahun 2011 – 2015.

Pada Tabel 6 disajikan pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis 2011 – 2015. Secara umum, rasio pencapaian sudah memenuhi setiap target yang diinginkan, bahkan terdapat beberapa indikator yang melebihi target yang diinginkan.

Tabel II.6. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 – 2015.

| NO | Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Produksi perikanan | | % | | 87,42 | 70,12 | 73,82 | 76,66 | 80,38 | 87,42 | 92,3 | 91,14 | 89,28 | 80,87 | 100 | 131,6 | 123,6 | 118,1 | 100,8 |
| 2 | Konsumsi ikan | | % | | 92,13 | 94,43 | 97,23 | 98,88 | 99,83 | 92,13 | 93,83 | 99,47 | 122,17 | 121 | 100 | 99,36 | 102,3 | 123,6 | 128,6 |
| 3 | Cakupan binaan kelompok nelayan | | % | | 91,89 | 92,4 | 94,04 | 96,66 | 97,66 | 100 | 100 | 81,1 | 20,94 | 78,59 | 108,6 | 108,2 | 64,34 | 21,89 | 80,42 |
| 4 | Produksi perikanan kelompok nelayan | | % | | 61,02 | 63,06 | 66,24 | 69,06 | 82,3 | 96,2 | 98,18 | 100 | 90,18 | 93,73 | 186,6 | 186 | 177,6 | 162,7 | 160,4 |

Renstra 2016-2021
DKP Kab. Bengkulu

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Ta. 2011-2015

| No | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2,822,338,300 | 2,462,902,423 | 2,593,050,816 | 2,154,318,598 | 2,298,744,700 | 2,154,402,501 | 1,616,579,183 | 2,046,803,085 | 1,738,987,541 | 2,065,682,589 | 89.78 | 65.64 | 78.98 | 80.72 | 89.86 | -3.24% | -3.22% |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 422,845,000 | 1,004,576,000 | 700,600,000 | 2,025,480,000 | 1,579,230,000 | 328,032,900 | 917,833,525 | 652,897,000 | 1,804,612,800 | 1,846,714,199 | 77.58 | 91.37 | 93.19 | 89.10 | 93.30 | 47.09% | 54.04% |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 124,732,000 | - | - | 31,454,700 | 234,129,600 | 79,607,000 | - | - | 25,761,100 | 180,883,600 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 81.90 | 77.26 | 17.05% | 22.28% |
| 4 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | 23,750,000 | 107,250,000 | - | - | - | 21,800,000 | 101,623,150 | - | - | 0.00 | 91.79 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 331.58% | 366.16% |
| 5 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | 150,814,700 | 3,846,297,167 | 3,059,733,176 | 4,255,687,975 | 667,703,008 | 147,814,700 | 3,718,142,419 | 2,825,124,614 | 3,545,837,900 | 885,435,352 | 98.01 | 96.67 | 92.33 | 83.32 | 57.73 | 45.06% | 27.07% |
| 6 | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | 1,155,774,175 | 1,101,032,026 | 1,571,246,608 | 1,525,290,600 | 1,728,796,480 | 1,061,790,275 | 983,202,934 | 1,229,484,024 | 1,134,646,500 | 1,166,146,680 | 91.87 | 89.30 | 78.25 | 74.39 | 67.45 | 10.59% | 2.37% |
| 7 | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya | 896,843,600 | 801,817,190 | 1,059,349,665 | 1,189,236,900 | 1,120,390,800 | 564,402,800 | 319,690,393 | 528,628,200 | 786,950,600 | 575,085,600 | 62.93 | 39.87 | 45.90 | 66.17 | 51.33 | 5.72% | 0.47% |
| 8 | Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakirannya Iklim Laut | 1,099,876,700 | 2,187,217,861 | 1,576,689,400 | - | 1,157,235,880 | 1,094,771,500 | 2,170,916,861 | 1,561,326,000 | - | 1,053,617,880 | 99.90 | 99.25 | 99.04 | 0.00 | 91.05 | 1.37% | -0.95% |
| 9 | Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada | 459,782,400 | 493,908,018 | 669,751,300 | 505,414,000 | 776,757,200 | 453,409,000 | 460,831,600 | 584,730,450 | 444,667,640 | 583,391,156 | 98.61 | 93.30 | 87.31 | 87.98 | 75.11 | 14.01% | 6.50% |
| 10 | Program Pengembangan Budaya Perikanan | 10,173,778,568 | 20,747,570,982 | 9,796,719,250 | 9,850,052,820 | 7,117,474,700 | 9,267,178,745 | 16,856,137,165 | 8,926,250,350 | 8,950,741,952 | 9,384,732,965 | 91.09 | 81.24 | 91.11 | 90.87 | 75.66 | -8.54% | -12.69% |
| 11 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 12,565,933,250 | 29,324,248,190 | 6,486,609,205 | 8,396,567,100 | 1,608,751,600 | 11,199,372,640 | 28,365,306,475 | 5,735,029,330 | 7,036,567,170 | 741,439,068 | 89.12 | 96.73 | 88.41 | 83.80 | 46.09 | -40.16% | -49.28% |
| 12 | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | 411,531,375 | 348,487,824 | 838,134,200 | 904,769,200 | 822,947,800 | 335,801,375 | 276,598,425 | 439,435,200 | 360,290,500 | 343,625,200 | 81.58 | 79.37 | 52.43 | 39.82 | 41.76 | 18.91% | 0.58% |
| 13 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 649,399,900 | 421,830,140 | 830,848,800 | 2,601,210,000 | 2,229,964,000 | 421,803,900 | 351,668,300 | 643,863,800 | 2,216,752,400 | 1,723,985,863 | 93.86 | 83.37 | 77.49 | 85.22 | 77.31 | 49.23% | 42.15% |
| 14 | Program Pengembangan Kawasan Budaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 235,184,900 | 158,433,029 | 269,630,000 | 527,685,180 | 291,953,500 | 201,252,600 | 113,478,750 | 199,745,000 | 382,070,600 | 185,768,000 | 85.57 | 71.63 | 74.08 | 72.41 | 63.97 | 5.55% | -1.85% |
| 15 | Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan | 1,053,025,375 | 1,089,246,277 | 1,297,610,283 | 3,295,341,500 | 2,763,868,543 | 1,029,245,275 | 982,882,250 | 915,541,000 | 2,525,935,900 | 1,918,887,066 | 97.74 | 90.73 | 70.56 | 76.65 | 69.43 | 27.28% | 16.85% |
| 16 | Program Pengembangan Kawasan Minapalitan | 593,759,000 | 252,948,650 | 220,234,200 | 283,880,300 | 282,769,400 | 570,597,400 | 54,183,490 | 5,596,700 | 241,716,800 | 243,382,400 | 96.12 | 21.42 | 2.54 | 85.15 | 86.07 | -16.93% | -19.19% |

2.3.1. Capaian kinerja dari tahun 2011 – 2015

Pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Bengkalis menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dengan beberapa indikator makro hasil pembangunan kelautan dan perikanan diuraikan sebagai berikut :

2.3.1.1. Produksi Perikanan

Secara umum produksi perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan terjadi penurunan dari setiap tahunnya yakni dari 8.225,00 ton pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 turun menjadi 8.050,00 ton, namun pada produksi budidaya perikanan mengalami kenaikan terjadi pada tahun 2013 yakni 716,21 ton dari 325,63 pada tahun 2012. Produksi perikanan tangkap tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 produksi 7.580,00 ton yakni mengalami penurunan sekitar 8,00%, keadaan ini diprediksi karena menurunnya setruktur penangkapan ikan dan kualitas sarana prasarana penangkapan ikan walaupun pada tahun 2012 telah mencapai produksi perikanan penangkapan tertinggi di Propinsi Riau.

2.3.1.2. Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Konsumsi ikan pada periode 2011 – 2015 meningkat sebesar 26,80%. Pada tahun 2011, tingkat konsumsi ikan sebesar 27,65 kg/kapita/tahun, menjadi 37,80 kg/kapita/tahun pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, bahwa tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Bengkalis sudah melebihi target nasional yaitu sebesar 35,14 kg/kapita/tahun.

Tabel II.8. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bengkulu tahun 2011- 2015.

| URAIAN | TAHUN | | | | | RATA-RATA KENAIKAN (%) |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| KONSUMSI IKAN (Kg/Orang/Tahun) | 27,65 | 28,15 | 29,84 | 36,65 | 37,80 | 1,08 |

2.3.1.3. Pembinaan dan Produksi Kelompok Nelayan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu dalam upaya untuk mencapai kinerja pelayanan terhadap kelompok nelayan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan sebagai berikut :

1. Bantuan sarana dan prasarana perikanan

Bantuan yang diberikan bersifat bantuan sosial dan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan baik Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya. Bantuan yang diberikan berupa bantuan sarana dan prasarana produksi seperti alat tangkap dan armada penangkapan (nelayan penangkap ikan), bantuan benih, kolam dan pakan (untuk pembudidaya ikan) serta bantuan sarana dan prasarana penunjang aktifitas penangkapan dan budidaya perikanan.

2. Bantuan sarana dan prasarana masyarakat pesisir

Bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir di prioritaskan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam upaya pelestarian wilayah pesisir dan wilayah yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat tidak layak. Bantuan yang diberikan seperti perumahan layak huni, sarana dan prasarana masyarakat, air bersih, air layak minum serta bantuan listrik tenaga surya.

3. Bantuan pengawasan dan pemantauan aktifitas penangkapan

Salah satu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya nelayan penangkap ikan adalah kenyamanan dan keamanan bagi nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan. Hal ini terkait dengan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi dilaut baik itu konflik internal sesama nelayan maupun dengan kelompok lain. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan secara rutin melakukan pengawasan di areal penangkapan ikan nelayan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan nelayan. Selain itu juga dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang terdiri dari masyarakat yang telah diberi pelatihan dan bimbingan terkait dengan kegiatan pengawasan sehingga dapat membantu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

4. Pelatihan, Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Pembinaan

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sektor kelautan dan perikanan pelayanan yang diberikan melalui pemberian pelatihan, bimbingan teknis penyuluhan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan tersebut dilakukan baik di lokasi tempat usaha dilakukan atau dengan melakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil dalam upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari pengembangan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya kelautan di Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yakni sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM nelayan dan pembudidaya ikan.

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan dengan program dan kegiatan melalui kelembagaan masyarakat yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB), kondisi saat ini KUB dan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang telah dibentuk belum memiliki kekuatan secara hukum sesuai dengan ketentuan, sedangkan rendahnya SDM nelayan sesuai dengan regulasi pengoperasian kapal ikan belum memiliki kemampuan dan sertifikasi keahlian ankapin dan atkapin.

- b. Menurunnya kualitas sumberdaya perairan.

Sumberdaya perairan merupakan ruang hidup utama dan merupakan tempat berkembang biak flora disepanjang pantai dan dapat mempengaruhi tingkat kesuburan perairan itu sendiri, kondisi saat ini cukup banyak pihak yang sangat berkepentingan pada wilayah tersebut sehingga sangat berdampak pada kerusakan lingkungan baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam.

- c. Pertambahan penduduk.

Meningkatkan ketahanan pangan daerah merupakan sasaran strategis Kepala Daerah lima tahun kedepan, penyediaan pangan harus diimbangi sejalan dengan pertambahan penduduk, produk perikanan merupakan salah satu produk unggulan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan bertambahnya penduduk juga harus adanya peningkatan konsumsi ikan sehingga dapat meningkatkan manfaat dari konsumsi produk perikanan bagi masyarakat.

- d. Menurunnya produksi perikanan.

Berdasarkan data statistik tiga tahun terakhir produksi perikanan mengalami penurunan terutama pada produksi perikanan tangkap, hal tersebut disebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penangkapan ikan. Sarana penangkapan ikan (alat tangkap ikan) semakin

menurun jumlahnya dan prasarana penangkapan ikan (kapal ikan) mengalami penurunan kualitas (kurang layak operasi) karena sulitnya masyarakat nelayan untuk membangun yang baru dan merehabilitasi kapal-kapal ikan yang terbuat dari kayu karena sulit dan tidak tersedianya bahan (kayu).

2. Peluang

a. Potensi Sumberdaya kelautan dan perikanan.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan terdiri dari potensi perikanan tangkap dan potensi perikanan budidaya. Potensi perikanan penangkapan didukung dengan kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang memiliki 17 buah pulau dan berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 Selat Malaka sebagai wilayah penangkapan ikan (*Fishing ground*), dan selat lainnya yang merupakan wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional. Pengembangan produksi perikanan lainnya yaitu perikanan budidaya baik budidaya laut, air payau (tambak) maupun budidaya ikan air tawar. Potensi budidaya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, dan secara bertahap melalui program dan kegiatan diharapkan pemanfaatan potensi tersebut dapat kesejahteraan masyarakat.

b. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP).

Kabupaten Bengkalis terdiri dari delapan wilayah kecamatan, dan 6 kecamatan berada pada wilayah pesisir, dengan wilayah pesisir tersebut matapencaharian masyarakatnya didominasi sebagai nelayan, data statistik 2015 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dengan jumlah 5.058 yang terdiri dari RTP penangkap ikan berjumlah 3.386, dan RTP perikanan budidaya berjumlah 1.670.

c. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah.

Regulasi dan kebijakan pemerintah sangat mendukung dalam pengelolaan sumberdaya kalautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya perikanan. Kebijakan pemerintah seperti nawacita presiden jokowi sangat memberikan dukungan terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil begitu juga kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan program dan kegiatannya.

d. Dukungan K/L dan instansi lainnya.

Banyaknya program-program prioritas pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten seperti bantuan langsung masyarakat (BLM), bantuan sosial dan hibah, bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi serta bantuan pinjaman modal bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu kritis/strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan dimasa yang akan datang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi SOPD yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

Bidang Kelautan dan Perikanan memiliki permasalahan yang kompleks bukan hanya pada yang tertuang dalam RPJMD, karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat dibidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Dari berbagai permasalahan kegiatan kelautan dan perikanan telah dipilih berdasarkan tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan yaitu sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan SOPD

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa perubahan dalam peningkatan peran strategis sektor kelautan dan perikanan dalam peran sertanya dalam pembangunan Provinsi Riau. Peran strategis tersebut meliputi peran dalam penyediaan produk hasil-hasil kelautan dan perikanan, sehingga menjamin ketersediaan protein hewani berasal dari ikan, keseimbangan *supply-demand*, peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis telah melahirkan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015 telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Meskipun begitu, tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Adapun identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat pendapatan nelayan.
2. Masih kurangnya hasil produksi perikanan.
3. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan (SDM)nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan tangkap dan budidaya.
5. Kerusakan ekosistem daerah pesisir (*mangrove*) di beberapa kawasan.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perikanan bagi nelayan
7. Menurunnya sumberdaya ikan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan WKD Terpilih

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan kedepan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis adalah ***"Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia"***

Guna merealisasikan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya untuk tercapainya visi dan Misi telah disusun program-program untuk Tahun 2016-2021 yang disebut dengan GERBANG, yakni gerakan pembangunan negeri untuk menggerakkan gagasan pembangunan daerah dengan membagikan pusat kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan kekuatan strategis daerah. Gerbang pembangunan negeri dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses pembangunan dan kemajuan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Gerbang pembangunan negeri dibagi dalam 4 wilayah yang terdiri dari :

1. Gerbang Utama

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Fokus gerbang ini menjadikan Pulau Bengkalis sebagai pusat ibu kota kabupaten, pusat pemerintahan, pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan budaya melayu serumpun.

2. Gerbang Laksamana

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil. Fokus gerbang ini menjadikan kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri wisata religius, pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan rakyat moderen yang pro rakyat.

3. Gerbang Permata

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Fokus gerbang ini menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai pusat pengembangan industri, pertambangan, perdagangan, perburuhan, peternakan, pertanian dan perkebunan.

4. Gerbang Pesisir

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara. Fokus gerbang ini menjadikan Kecamatan rupert dan Kecamatan Rupert Utara sebagai

pusat pengembangan pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.

Untuk pencapaian visi dan misi Bupati Bengkalis Tahun 2016-2021, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Bagaimanapun juga pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Keterkaitan dengan visi dan misi Bupati Bengkalis Tahun 2016-2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab terhadap pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, penyerapan tenaga kerja, menjamin ketersediaan protein hewani bersumber dari ikan, khususnya dalam meningkatkan konsumsi ikan per kapita, dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dan sesuai dengan gagasan pembangunan pada subsektor kelautan dan perikanan melakukan beberapa agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Membuat kebijakan daerah yang melindungi kepentingan ekonomi para petani dan nelayan.
2. Memfasilitasi distribusi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan rakyat.
3. Pemerintah daerah menjamin dan memfasilitasi akses modal bagi para petani dan nelayan dengan membentuk lembaga keuangan untuk petani dan nelayan.
4. Penerapan teknologi tepat guna untuk petani dan nelayan.
5. Pemberian alat perlengkapan perikanan bagi para nelayan.
6. Melakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan secara berkala bagi para petani dan nelayan.

Selanjutnya Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara

program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandate yang diberikan. Adapun misi Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2016 – 2021 sebagai salah satu SOPD yang melaksanakan bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan pengelolaan usaha perikanan;
2. meningkatkan konsumsi sumberdaya perikanan;
3. Meningkatkan capaian kinerja dan keuangan;

dengan sasarannya adalah :

1. meningkatnya produktivitas dan kualitas usaha perikanan
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan
3. meningkatnya konsumsi hasil perikanan
4. Meningkatnya kualitas capaian kinerja

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan periode 2016-2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel III.1. Misi, Tujuan, sasaran, Urusan dan Program Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021

| MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN | SOPD |
|--|--|---|-------------------------------|--|
| Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera | Meningkatnya pengelolaan usaha perikanan | 1. Meningkatnya produktivitas dan kualitas usaha perikanan 2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan | Urusan Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis |
| Misi 2 : Mewujudkan ketersediaan pangan sumberdaya perikanan | Meningkatnya konsumsi hasil perikanan | 1. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) | | |

Untuk mencapai misi dan gagasan tersebut, tentu tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau. Di samping itu perlu dilakukan terobosan kinerja yang bersinerji, terintegrasi, dan akuntabel antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dengan pihak terkait lainnya. Oleh karenanya sangat diperlukan kompetensi dan komitmen dari SDM bidang kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta distribusi SDM bidang kelautan dan perikanan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, tetap mengacu kepada arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional dari kementerian dan lembaga serta rencana strategis propinsi yang terkait langsung terhadap pembangunan Kelautan dan Perikanan. Dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 untuk mewujudkan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan.

Dari review Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau adalah sebagai berikut

1. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yakni pembangunan kemaritiman dan kelautan yang menjadi sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Memperkuat jatidiri maritim;
2. Memberantas tindakan perikanan liar;
3. Membangun konektivitas laut;
4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;

2. Program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019.

Terkait dengan prioritas pembangunan nasional maka Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program prioritas sebagai pelaksanaan misi kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
3. Penataan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
4. Keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
5. Daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
6. SDM aparatur dan masyarakat; dan
7. Inovasi iptek kelautan dan perikanan;

3. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparat, pembudidaya ikan, dan nelayan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan upaya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil perikanan;
3. Meningkatkan mutu produk perikanan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan;

4. Meningkatkan dukungan fasilitas perikanan dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
5. Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif guna meningkatkan investasi dibidang perikanan dan kelautan;
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan guna menunjang terciptanya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat pembudidaya ikan, nelayan dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan;
8. Meningkatkan kualitas pembangunan perikanan dan kelautan melalui kerjasama dan koordinasi program antar provinsi dan kabupaten/kota guna memberikan pelayanan yang optimal;

Sasaran :

1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petugas dan kualitas sumberdaya manusia kelompok sasaran program;
 2. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam perekonomian Provinsi Riau;
 3. Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
 4. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat;
4. Program prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau adalah sebagai berikut :
1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
 2. Pengembangan budidaya perikanan;
 3. Pengembangan perikanan tangkap;
 4. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan;
 5. Pelestarian dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan;
 6. Pengembangan sumberdaya manusia perikanan dan kelautan;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Bengkalis adalah letak geografis Kabupaten Bengkalis yang berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis termasuk wilayah pengembangan luar kota Bengkalis sehingga pertumbuhan Kabupaten Bengkalis mengarah ke kecamatan-kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis guna meningkatkan perekonomian, industri, jasa, pariwisata, perikanan dan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah yang letaknya sangat strategis, karena disamping berada di tepi alur pelayaran internasional yang sibuk, yakni selat malaka, juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMT-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dimana Kabupaten Bengkalis mempunyai sumberdeaya alam hutan, perikanan, perkebunan serta ekosistem yang menunjang kelangsungan makhluk hidup utamanya manusia, sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi kawasan konservasi, pengendalian perkembangan pemukiman pada kawasan hijau dan analisa dampak lingkungan.

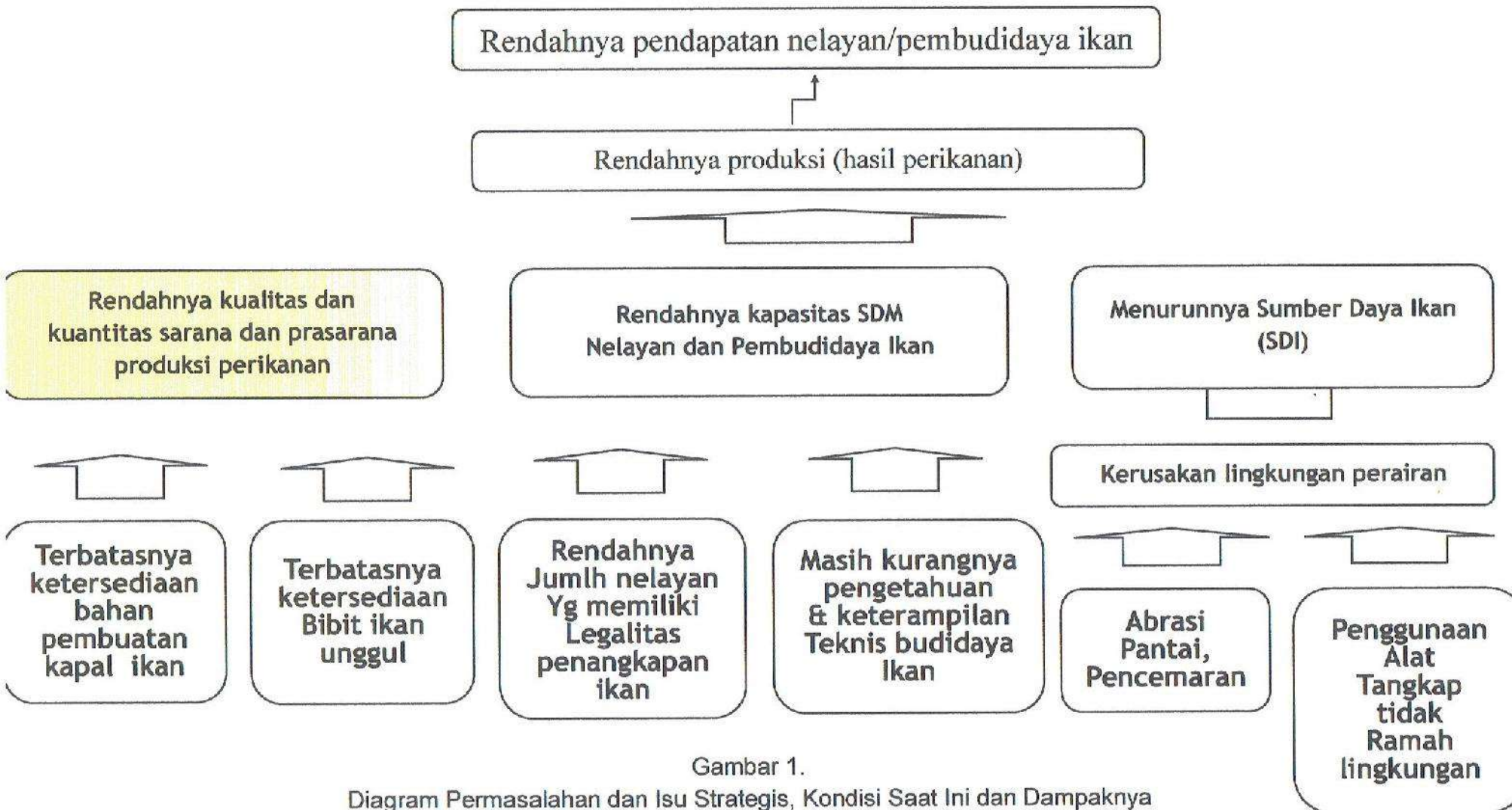
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama periode 2011-2015, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain (1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi perikanan, (2) Rendahnya kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan, (3) Menurunnya sumberdaya ikan (SDI).

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa

penyebab permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting bagi peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pembenahan di masa mendatang sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada Gambar 4.1 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

ANALISA PERMASALAHAN (MASALAH DAN PENYEBAB)



Gambar 1.

Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat memastikan berjalannya proses pembangunan kelautan dan perikanan, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal sehingga perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah:

- 1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi perikanan.
- 2) Rendahnya kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan.
- 3) Menurunnya Sumberdaya Ikan (SDI)

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis terus melakukan perbaikan, yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

4.1.1 Visi

Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan telah membawa hasil yang cukup baik. Namun demikian, perubahan tatanan nasional dan regional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan perikanan dan kelautan secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak dinamis tersebut.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Pada sisi lain, kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Selanjutnya, pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai ujung tombak di daerah yang menangani bidang kelautan dan perikanan menjadi sangat penting. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 telah dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis yang diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Dengan mempertimbangkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bengkalis tahun 2016–2021 dengan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Perikanan Bengkalis yang Tangguh Dan Lestari ”

Visi ini merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis akan diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis secara terus menerus mengembangkan peranan dan fungsinya agar tetap eksis dan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan stabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Penjabaran formulasi visi pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. **Perikanan yang tangguh**, berarti produk perikanan mampu menghasilkan produksi yang kontinyu, berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif, dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat perikanan serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
2. **Perikanan yang lestari**, artinya pembangunan perikanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya manusia dan sumberdaya alam sehingga potensi perikanan mampu bertahan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumber daya terbarukan.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera.
2. Mewujudkan ketersediaan pangan sumberdaya perikanan.
3. Mewujudkan sistim manajemen dan pemerintahan yang baik.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Memperhatikan kondisi perikanan dan kelautan saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan yang ada serta mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sehingga dapat memperjelas penetapan program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan usaha perikanan;
2. Meningkatkan konsumsi sumberdaya perikanan;
3. Meningkatkan capaian kinerja keuangan.

Sedangkan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas dan kualitas usaha perikanan,
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan,
3. Meningkatnya konsumsi hasil perikanan,
4. Meningkatnya kualitas capaian kinerja.

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

| Visi : Terwujudnya Perikanan Bengkalis Yang Tangguh dan Sejahtera | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Misi / Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke | | | | | | Target Akhir |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera | | | | | | | | | |
| Meningkatnya pengelolaan usaha perikanan | 1. Meningkatnya produktivitas dan kualitas usaha perikanan | 1. Produktivitas perikanan kelompok nelayan <= 5 GT (ton) | 6685 | 6734 | 6790 | 6895 | 6930 | 6965 | 6965 |
| | | 2. Produktivitas perikanan budidaya (ton) | 417 | 432,5 | 443 | 462,5 | 492,5 | 495 | 495 |
| | 2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan | 3. Pendapatan rata-rata nelayan (Rp. juta) | 27,6 | 30 | 32,4 | 34,8 | 37,2 | 39,6 | 39,6 |
| Misi 2 : Mewujudkan ketersediaan pangan sumberdaya perikanan | | | | | | | | | |
| Meningkatkan konsumsi sumberdaya perikanan | 3. Meningkatnya konsumsi hasil perikanan | Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) | 36,75 | 37,22 | 38,13 | 38,80 | 39,48 | 41,60 | 41,60 |
| Misi 3 : Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik | | | | | | | | | |
| Meningkatkan capaian kinerja keuangan | Meningkatnya kualitas capaian kinerja | 1. Nilai akuntabilitas kinerja | C | C | CC | CC | B | B | B |
| | | 2. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Periode 2016-2021 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan teknik analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

■ **Kekuatan (*Strength*)**

1. Kualitas SDM Aparatur yang memadai.
2. Adanya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan.
3. Adanya standarisasi mutu usaha perikanan.
4. MOU dengan K/L

■ **Kelemahan (*Weakness*)**

1. Jumlah SDM Aparatur perlu ditingkatkan.
2. Belum sepenuhnya menerapkan SPIP.

■ **Peluang (*Opportunity*)**

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Jumlah Rumah tangga Perikanan.
3. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah.
4. Dukungan K/L dan Instansi lainnya.

■ **Tantangan (*Threat*)**

1. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM nelayan dan pembudidaya ikan.
2. Menurunnya kualitas sumberdaya perairan.
3. Pertambahan penduduk.
4. Menurunnya produksi perikanan.

Tabel V.1. Penilaian Analisa SWOT

Analisa Lingkungan Internal (*Strength & Weakness*)

| Kekuatan (<i>Strength</i>) | No | Obyek yang dianalisa | SKOR |
|---------------------------------|--------------|---|-----------|
| | 1. | Kualitas SDM Aparatur yang memadai | 5 |
| | 2. | Adanya sarpras pendukung produksi perikanan | 4 |
| | 3. | Adanya standarisasi mutu usaha perikanan | 3 |
| | 4. | MOU dengan K/L | 2 |
| | TOTAL | | 14 |

| Kelemahan (<i>Weakness</i>) | No | Obyek yang dianalisa | SKOR |
|----------------------------------|----|--|------|
| | 1. | Jumlah SDM Aparatur perlu ditingkatkan | 3 |
| | 2. | Belum sepenuhnya menerapkan SPIP | 2 |
| | | TOTAL | |

Analisa Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)

| Peluang (<i>Opportunity</i>) | No | Obyek yang dianalisa | SKOR |
|-----------------------------------|--------------|---|-----------|
| | 1. | Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 5 |
| | 2. | Jumlah Rumah Tangga Perikanan | 4 |
| | 3. | Regulasi dan Kebijakan pemerintah | 3 |
| | 4. | Dukungan K/L dan Instansi lainnya | 2 |
| | TOTAL | | 14 |

| Tantangan (<i>Threat</i>) | No | Obyek yang dianalisa | SKOR |
|--------------------------------|--------------|--|-----------|
| | 1. | Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM nelayan dan pembudidaya ikan | 3 |
| | 2. | Menurunnya kualitas sumberdaya perairan | 4 |
| | 3. | Pertambahan penduduk | 1 |
| | 4. | Menurunnya produksi perikanan | 2 |
| | TOTAL | | 10 |

Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel V.2. Formulasi Strategi SWOT

| FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL | PELUANG (OPPORTUNNITY) | TANTANGAN (THREATS) |
|---|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan; Jumlah Rumah Tangga Perikanan; Regulasi dan kebijakan pemerintah Dukungan K/L dan Instansi lainnya |
| KEKUATAN (STRENGTH) | (SO) | (ST) |
| <ol style="list-style-type: none"> Kualitas SDM Aparatur yang memadai; Sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan; Adanya standarisasi mutu usaha perikanan; MOU dengan K/L; | <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi perikanan khususnya bagi RTP; Menerapkan dan meningkatkan kerjasama. | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan SDM nelayan dan pembudidaya ikan; Meningkatkan pengelolaan perairan untuk kelestarian SDI; Meningkatkan usaha peningkatan produksi perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kerjasama dengan instansi terkait. |
| KELEMAHAN (WEAKNESS) | (WO) | (WT) |
| <ol style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Aparatur perlu ditingkatkan Belum sepenuhnya menerapkan SPIP | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah SDM Aparatur dalam upaya optimalisasi potensi SD kelautan dan perikanan; Meningkatkan SPIP untuk mendukung penerapan regulasi dan terciptanya kepercayaan K/L dan instansi lainnya; | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah Aparatur untuk mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan SDM nelayan Meningkatkan implementasi SPIP dalam upaya optimalisasi kinerja untuk pengelolaan SD kelautan serta peningkatan produksi perikanan. |

Tabel V.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis 2016-2021

| Visi : Terwujudnya Perikanan Bengkalis yang Tangguh dan Sejahtera | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|
| Misi / Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Misi 1 : Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera | | | | |
| Tujuan : Meningkatkan pengelolaan usaha perikanan | Angka produksi Perikanan | 1. Meningkatnya produktivitas dan kualitas usaha perikanan | 1 Peningkatan kecakapan kepelautan | 1 Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kelompok nelayan |
| | | | 2 Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya | 2 Menyediakan kemudahan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan kelompok nelayan |
| | | | 3 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan | 3 Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan perikanan budidaya |
| | | 2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan | 4. Peningkatan pengolahan produksi perikanan | 4. Menyediakan kemudahan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya |
| | | | | 5. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan |
| | | 6. Menyediakan kemudahan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan | | |
| Misi 2 : Mewujudkan ketersediaan pangan sumberdaya perikanan | | | | |
| Tujuan : Meningkatkan konsumsi sumberdaya perikanan | Angka Konsumsi ikan | 1. Meningkatnya konsumsi hasil perikanan | 1. Peningkatan kesadaran konsumsi ikan | 1. Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan |
| | | | 2. Ketersediaan keanekaragaman ikan | 2. Meningkatkan Keberagaman Olahan Ikan |
| Misi 3 : Mewujudkan sistim manajemen dan pemerintahan yang baik | | | | |
| Tujuan : Meningkatkan capaian kinerja dan keuangan | | 1. Meningkatnya kualitas capaian kinerja | 1. Peningkatan tata kelola dan manajemen yang baik | 1. Meningkatkan tatakelola manajemen yang akuntabel |

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021. Program-program tersebut merupakan program unggulan dibidang kelautan dan perikanan yang berorientasi pada pengembangan sektor produksi perikanan di bidang penangkapan dan budidaya perikanan (bahan baku maupun bahan olahan). Selain pengembangan sektor produksi perikanan program pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan program prioritas dari rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Dalam menunjang keberhasilan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan unggulan dalam upaya peningkatan produksi bidang kelautan dan perikanan diperlukan beberapa indikator pencapaian target kinerja meliputi peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan (penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil), peningkatan kualitas sumber daya manusia seluruh stakeholder kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas lingkungan perairan serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat khususnya nelayan dan masyarakat pesisir yang memiliki integritas dan kemandirian.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

Sasaran pelaksanaan seluruh program/kegiatan unggulan dan prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah seluruh stakeholder kelautan dan perikanan khususnya bagi aparat pemerintah di bidang kelautan dan perikanan serta masyarakat pelaku usaha perikanan yaitu masyarakat pembudidaya ikan, nelayan, masyarakat pengolah hasil perikanan serta masyarakat pesisir yang memiliki kegiatan dan aktifitas di wilayah pesisir.

Mengacu pada program pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, maka Program Pembangunan Jangka Menengah, Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bengkalis periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir, (2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, (3) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam pendayagunaan Sumberdaya Laut, (4) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut, (5) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat , (6) Program Pengembangan Perikanan Budidaya, (7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, (8) Program Pengembangan sistem Penyuluhan Perikanan, (9) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan, (10) Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar, (11) Program pengembangan Sumberdaya Perikanan, (12) Pengembangan kawasan Minapolitan.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel VI.1 dibawah ini.

Renstra 2016-2021
DKP Kab. Bengkalis

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|----|----|----|-------|--|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----|----|----------------|----------------|
| | | | 0 5 0 | 13 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 2 | 13 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 479.426.000 | | | | | | | | | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 1 | 14 Pengembangan Jaringan Listrik Desa | 14 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 550.152.400 | | | | | | | | | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 2 | 15 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 3 | 15 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 606.122.000 | 2.000 | 875.267.300 | 2.000 | 882.000.000 | 2.000 | 670.000.000 | 2.000 | 670.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 0 | 16 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 4 | 16 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 348.513.000 | 11.000 | 521.000.000 | 11.000 | 510.000.000 | 11.000 | 546.000.000 | 11.000 | 546.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 1 5 7 | 17 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 5 | 17 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 772.133.000 | 275.000 | 850.000.000 | 350.000 | 850.000.000 | 300.000 | 400.000.000 | 300.000 | 400.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 0 | 19 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 6 | 19 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 459.627.500 | 11.000 | 459.627.500 | 11.000 | 459.627.500 | 11.000 | 500.000.000 | 11.000 | 500.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 0 | 20 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 7 | 20 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 351.534.000 | 11.000 | 351.534.000 | 11.000 | 351.534.000 | 11.000 | 350.000.000 | 11.000 | 350.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 0 | 21 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 8 | 21 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 1.325.238.300 | 11.000 | 1.325.238.300 | 11.000 | 1.325.238.300 | 11.000 | 350.000.000 | 11.000 | 350.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 0 | 22 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 9 | 22 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 551.534.000 | 11.000 | 551.534.000 | 11.000 | 551.534.000 | 11.000 | 500.000.000 | 11.000 | 500.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 0 | 23 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 10 | 23 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 500.000.000 | 4.000 | 500.000.000 | 4.000 | 500.000.000 | 4.000 | 500.000.000 | 4.000 | 500.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 5 0 | 24 Pengembangan Jaringan Listrik Desa 11 | 24 Jumlah Desa yang akan dilayani | | 100% | 1.000.000.000 | 2.000 | 1.000.000.000 | 2.000 | 1.000.000.000 | 2.000 | 1.000.000.000 | 2.000 | 1.000.000.000 | | | | Kab. Bengkalis | |
| 11 | 11 | 11 | 2 1 | 11 Program Pengembangan Pelayanan Masyarakat | 11 Jumlah Desa yang akan dilayani | 3.025.075.000 | | | | | | | | | | | | | | Kab. Bengkalis | |
| | | | 0 6 0 | 1 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 1 | 1 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 157.552.000 | | | | | | | | | | | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 2 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 2 | 2 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 252.175.000 | | | | | | | | | | | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 3 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 3 | 3 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 400.000.000 | 100% | 55.704.000 | 100% | 500.000.000 | 1.000 | 500.000.000 | 1.000 | 200.000.000 | 1.000 | 200.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 4 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 4 | 4 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 500.000.000 | 1.000 | 100.000.000 | 1.000 | 300.000.000 | 1.000 | 300.000.000 | 1.000 | 200.000.000 | 1.000 | 200.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 5 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 5 | 5 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 400.000.000 | | | | | | | | | | | | | | Batang |
| | | | 0 6 0 | 6 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 6 | 6 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 120.000.000 | 120 | 105.547.751 | 120 | 336.247.761 | 150 | 300.000.000 | 150 | 300.000.000 | 150 | 300.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 7 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 7 | 7 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 500.000.000 | 40.000 | 100.470.000 | 37.000 | 529.568.000 | 30.000 | 530.000.000 | 30.000 | 500.000.000 | 30.000 | 500.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 8 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 8 | 8 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 200.000.000 | | | | | | | | | | | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 9 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 9 | 9 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 300.000.000 | | | | | | | | | | | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 10 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 10 | 10 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 300.000.000 | 40.000 | 100.000.000 | 40.000 | 100.000.000 | 40.000 | 100.000.000 | 40.000 | 100.000.000 | 40.000 | 100.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 11 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 11 | 11 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 800.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 12 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 12 | 12 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 800.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 13 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 13 | 13 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 400.000.000 | 4.000 | 100.000.000 | 4.000 | 400.000.000 | 4.000 | 400.000.000 | 4.000 | 400.000.000 | 4.000 | 400.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 14 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 14 | 14 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 400.000.000 | 4.000 | 100.000.000 | 4.000 | 400.000.000 | 4.000 | 400.000.000 | 4.000 | 400.000.000 | 4.000 | 400.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 6 0 | 15 Pengembangan Pelayanan Masyarakat 15 | 15 Jumlah Desa yang akan dilayani | 100% | 800.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | 8.000 | 100.000.000 | | | | Kab. Bengkalis |

Renstra 2016-2021
DKP Kab. Bengkalis

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--|---|------|---|--------|--|----|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 8 | 0 | 300 org | 600.000.000 | 300 org | 355.455.200 | 700.000.000 | 200 org | 800.000.000 | 200 org | 800.000.000 | 1500 orang | 700.000.000 | 1500 orang | 700.000.000 | Kab. Bengkalis |
| | | | | | 9 | 0 | | | | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | Kab. Bengkalis |
| | | | 0 | 3 | 10 | 0 | | | | | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | Kab. Bengkalis |
| | | | | | 11 | 0 | | | | | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | Kab. Bengkalis |
| | | | | | 12 | 0 | | | | | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | Kab. Bengkalis |
| XVI. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Minapolitan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Meningkatkan pengembangan kawasan minapolitan | 15.1 | Peningkatan pengembangan kawasan minapolitan | 15.1.1 | Terdapatnya pengembangan kawasan minapolitan | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| XVII. Terselektanya Lahan Basah Berair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Meningkatkan produksi pertanian | 17.1 | Peningkatan produksi pertanian budidaya perikanan | 17.1.1 | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | 17 | | 1.986.310.100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | 4.8 ha | 1.986.310.100 | 4.8 ha | 1.543.345.200 | | | | | | | | | | Kec. Lingsak |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas kelautan dan perikanan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas perikanan kelompok nelayan;
2. Produktivitas perikanan budidaya;
3. Pendapatan rata-rata pertahun nelayan;
4. Persentase konsumsi ikan;
5. Nilai akuntabilitas kinerja;
6. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan.

Berikut pada tabel 15 yang menggambarkan indikator kinerja dari SOPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis.

7.2. Tujuan

Tujuan yang tertuang didalam RPJMD yakni peningkatan pembangunan , pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dengan rencana strategis meningkatkan ketahanan pangan daerah.

7.3. Sasaran

Berdasarkan rumusan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Bengkalis yang tertuang didalam misi 2 yaitu terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja perekonomian daerah.
- b. Meningkatnya kesejahteraan petani

Tabel VII.1. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021.

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun (%) | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | |
| 1. | Produktivitas perikanan kelompok nelayan (ton) | 80,87 | 6685 | 6734 | 6790 | 6895 | 6930 | 6965 | 6965 |
| 2. | Produktivitas perikanan budidaya (ton) | 126,00 | 417 | 432,5 | 443 | 462,5 | 492,5 | 495 | 495 |
| 3. | Pendapatan rata-rata nelayan pertahun (Rp.Jt) | | 27,6 | 30 | 32,4 | 34,8 | 37,2 | 39,6 | 39,6 |
| 4. | Persentase konsumsi ikan | 126,00 | 87,5 | 88,20 | 90,60 | 92,40 | 94,00 | 95,00 | 95,00 |

BAB. VIII **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025 yang telah dijabarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Rencana Strategis ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidayaikan, pengolah dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat terwujud.

**Plt.KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN
BENGKALIS,**


Ir. HERLIWAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650721 199203 1 008